



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIL
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 443298

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/208 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1778 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 2220 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, LAINNYA Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/54 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, LAINNYA Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 15762 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, LAINNYA Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 22090 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 11960 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000

1. MOBIL, FORD ESCAPE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.900.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.010.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.740.910.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.740.910.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.